

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan perempuan di ruang publik hingga kini masih menjadi isu yang terus diperdebatkan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dalam struktur sosial, sering kali terjadi pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan, sementara di ranah domestik masyarakat telah lama dibentuk oleh pandangan bahwa perempuan ideal adalah sosok yang pasif dan terbatas pada urusan rumah tangga semata (Anto et al., 2023). Situasi ini semakin diperparah oleh pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual dan dangkal, seperti penafsiran terhadap dalil yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan mencapai keberhasilan apabila kepemimpinannya diserahkan kepada perempuan (Mursalim et al., 2024). Adapun dalam hadist sebagian pandangan ulama, perempuan diposisikan sebagai sosok yang dianggap sebagai aurat, sehingga keberadaannya dinilai lebih tepat jika dibatasi di dalam rumah agar tidak memicu fitnah bagi pihak lain (Mukaromah, 2024). Hadist tersebut berbunyi:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi Saw bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki" (Tirmidzi - 1093)

Selain itu, perempuan dalam perspektif tersebut baru dianggap sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan apabila mereka tetap berada di rumah dan tidak banyak terlibat dalam aktivitas di ruang publik (Haitomi & Najwah, 2021). Dasar utama argumentasi yang digunakan oleh para ulama dalam menanggapi persoalan keterlibatan perempuan di ruang publik bersumber dari penafsiran terhadap QS. al-Nisa [4]: 34. Penafsiran laki-laki sebagai *qawwāmun* (pemimpin atau pelindung) atas Perempuan, ini sering dijadikan landasan normatif untuk menempatkan perempuan berada di bawah otoritas laki-laki (Ardhi, 2025). Ibnu Katsir menjelaskan pandangannya tentang kepemimpinan perempuan dalam penafsiran

QS. al-Nisa ayat 34 dengan menegaskan bahwa laki-laki diposisikan sebagai pemimpin bagi perempuan berdasarkan sejumlah pertimbangan (Katsir,1994). Pertimbangan tersebut meliputi kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki laki-laki, baik dari segi fisik maupun psikologis, serta tanggung jawab mereka dalam menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Atas dasar itu, laki-laki dipandang lebih berhak memegang peran kepemimpinan dibandingkan Perempuan (Zulpiana et al., 2024).

Pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan tidak terbentuk secara alami, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu faktor tersebut adalah konstruksi sosial yang membentuk pandangan mengenai peran yang dianggap pantas dan wajar bagi laki-laki maupun perempuan (Dimiyati Huda, 2020). Selain itu, kebijakan pemerintah serta penafsiran terhadap teks-teks keagamaan turut berperan dalam membentuk dan mempertahankan pembagian peran tersebut. Faktor ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain sehingga melahirkan pandangan bahwa laki-laki berada pada posisi kepemimpinan, sedangkan perempuan lebih banyak ditempatkan dalam ranah domestik (Riyani Irma, 2021). Pandangan tersebut kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi, baik melalui kesepakatan sosial maupun pengaruh struktur kekuasaan yang berkembang di masyarakat (Siregar & Amran, 2018).

Budaya patriarki telah berkembang sejak lama dalam sejarah peradaban manusia dan turut memengaruhi posisi perempuan dalam kehidupan sosial. Sebelum Islam datang, perempuan sering mengalami perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan. Salah satu bentuk diskriminasi yang paling dikenal adalah praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup pada masa Arab pra-Islam (Yunus, et al., 2021). Praktik tersebut dilakukan karena kelahiran anak perempuan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan serta dipandang dapat membawa aib bagi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu berada pada posisi yang sangat rentan dan sering kali tidak memperoleh penghargaan yang setara dengan laki-laki (Rahmadani et al., 2024).

Kemudian Islam hadir dan Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, kondisi tersebut mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perempuan memperoleh keadilan dan penghargaan terhadap martabatnya, berbagai tradisi yang merendahkan perempuan pun mulai ditinggalkan, sehingga kedudukan perempuan menjadi lebih mulia sejak datangnya Islam (Ariziq, 2017). Dalam pandangan Allah, semua manusia memiliki kedudukan yang setara, tanpa memandang latar belakang, perbedaan ras, maupun jenis kelamin (Gozali, 2024). Adapun yang membedakan satu manusia dengan manusia lainnya hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Allah (Shafira, 2024). Prinsip ini menuntun manusia untuk saling menghormati keberadaan satu sama lain tanpa membedakan jenis kelamin.

Selanjutnya al-Qur'an datang dengan kisah Ratu Balqis, salah satu cerita yang sering dibahas dalam konteks kepemimpinan perempuan dalam Islam (Qolbi et al., 2023). Dalam cerita tersebut, Ratu Balqis digambarkan sebagai pemimpin kerajaan Saba' yang menunjukkan sifat bijaksana, cerdas, dan adil (Setiawati et al., 2024). Dalam tafsir-tafsir klasik tentang kisah Ratu Balqis umumnya hanya menceritakan secara kronologis, kisah ini dimulai dari peran burung Hud-hud yang menemukan keberadaan Ratu Balqis beserta kerajaannya hingga peristiwa masuknya Ratu Balqis ke dalam ajaran yang dibawa Nabi Sulaiman (Siti, 2021). Sejumlah peneliti telah menggunakan beragam pendekatan untuk menafsirkan ulang kisah ini, seperti pendekatan semantik dan semiotika. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, ditemukan nilai-nilai tersirat yang mengandung kriteria-kriteria kepemimpinan perempuan (Robikah, 2021).

Dalam al-Qur'an kisah Ratu Balqis terdapat pada QS.an-Naml 23-44 yang kemudian menjadi rujukan utama dalam melihat bagaimana hak dan nilai-nilai politik perempuan dalam kisah Ratu Balqis.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba’). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar.” (Qs.An-Naml [27]:23).

Ayat ini mengisahkan seorang pemimpin perempuan, digambarkan seorang Ratu yang berhasil memimpin sebuah kerajaan yang dalam al-Qur’an dikenal dengan Ratu Balqis, disebut sebagai ‘*arsyun ‘azhim* (singgasana besar) yang memperlihatkan kehebatan sebuah kerajaan (Sakdiah, 2023). Dalam al-Qur’an QS.An-Naml 23-44 secara jelas menceritakan kisah Ratu Balqis tentang bagaimana ia memimpin kerajaannya.

Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam ranah publik masih menjadi perdebatan karena sering dipertentangkan dengan perannya dalam ranah domestik. (Hudi, 2023). Ranah publik umumnya dipersepsikan sebagai wilayah laki-laki, sedangkan ranah domestik dianggap sebagai dominan perempuan. Pola tersebut kemudian berlanjut dalam masyarakat, di mana laki-laki beraktivitas di luar rumah, sementara perempuan di dalam rumah mengurus keluarga (Robikah, 2021). Fatima Mernissi seorang pemikir feminis Muslim, mengemukakan bahwa peran perempuan kerap dibatasi pada wilayah domestik saja. Salah satu faktornya banyak dipengaruhi oleh penafsiran yang bersifat patriarkal serta kepentingan politik tertentu sepanjang sejarah Islam (Mernissi, 1991). Menurut Fatima Mernissi, nilai-nilai keadilan dan keterbukaan dalam Islam perlu diwujudkan dalam kehidupan modern, agar perempuan dapat berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam membangun masyarakat (Nur Afiah et al., 2025).

Adapun dalam kebudayaan Sunda yang luhur berdasarkan catatan sejarah, perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang sejajar. Hal ini terlihat dari berbagai *folklor* serta naskah filologis yang ditulis oleh perempuan Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa mayoritas perempuan Sunda pada masa lampau digambarkan memiliki citra positif, kedudukan terhormat, dan hubungan yang setara dengan laki-laki. Bahkan, pada era Sunda kuno pernah berkembang sistem budaya matriarki, yaitu kondisi ketika perempuan menempati posisi yang lebih tinggi dibanding laki-laki (Amanah et al., 2023). Namun, seiring berjalannya waktu, khususnya pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, posisi perempuan dalam kebudayaan Sunda

mengalami perubahan. Kedudukan mereka menjadi semakin lemah dan lebih dibatasi pada ranah domestik. Selain itu, interaksi dengan berbagai kebudayaan lain turut membawa masuk nilai-nilai patriarki ke dalam masyarakat Sunda (Nugraha et al., 2023).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas kisah Ratu Balqis, namun masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus memetakan nilai-nilai politik dalam kisah ini dan dikaitkan dengan kepemimpinan perempuan dalam kebudayaan Sunda. Di sisi lain isu hak politik dan kepemimpinan perempuan dalam Islam hingga kini pun masih menuai perdebatan, terutama akibat dominasi tafsir yang cenderung patriarki dan tekstual terutama yang berkaitan dengan konsep hak politik perempuan (Ramadhani et al., 2024). Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji kisah Ratu Balqis melalui pendekatan Qashash al-Qur'an dan memanfaatkan literatur tafsir sunda kemudian mengaitkannya dengan tradisi dalam masyarakat Sunda (Qolbi., 2023).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis kisah Ratu Balqis melalui perspektif Qashash al-Qur'an untuk mengungkap hak dan nilai-nilai politik perempuan serta relevansinya dengan konsep kepemimpinan perempuan dalam kebudayaan Sunda. Sumber penelitian ini diambil dari penafsiran kisah Ratu Balqis dalam tafsir Sunda, yaitu *tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'arifati al-Qur'an* dan *tafsir Ayat Suci Lenyepaneun*, yang hingga kini masih relatif jarang dijadikan objek penelitian dalam penelitian serupa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir, gender, dan politik Islam yang berlandaskan pada narasi al-Qur'an dan konteks budaya lokal.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak politik dan kepemimpinan perempuan dalam perspektif al-Qur'an. Hingga saat ini, isu kepemimpinan perempuan masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat maupun akademisi, terutama karena adanya perbedaan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pendekatan yang bersifat tekstual. Padahal, kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml 23-44 menampilkan gambaran seorang

pemimpin perempuan yang memiliki kemampuan berdiplomasi, bermusyawarah, berpikir strategis, serta mengambil keputusan secara bijaksana..

Selain itu, penelitian ini penting dilakukan karena kajian mengenai kisah Ratu Balqis dalam tafsir Sunda masih relatif terbatas, khususnya yang berfokus pada hak dan nilai-nilai politik perempuan. Pemilihan *tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'arifati al-Qur'an* karya K.H. Ahmad Sanusi dan *tafsir Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim didasarkan pada keduanya yang merupakan representasi penting tradisi tafsir Sunda dari latar sosial dan corak penafsiran yang berbeda. *Tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'arifati al-Qur'an* merepresentasikan tradisi pesantren dengan kecenderungan penafsiran yang kuat pada aspek keagamaan dan fikih, sedangkan *tafsir Ayat Suci Lenyepaneun* merepresentasikan tafsir Sunda modern yang bercorak *adab ijtima'i* dan lebih dekat dengan realitas sosial masyarakat. Perbedaan karakter kedua tafsir tersebut memberikan ruang yang luas untuk melihat bagaimana hak dan nilai-nilai politik perempuan dipahami dalam konteks budaya Sunda. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir lokal, studi gender dalam Islam, serta wacana kepemimpinan perempuan yang berlandaskan pada al-Qur'an dan kearifan budaya Sunda.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini secara lebih mendalam dengan melalui penelitian yang berjudul "*Hak dan Nilai-Nilai Politik Perempuan dalam Kitab Tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'arifati al-Qur'an dan Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun. Studi kisah Ratu Balqis QS. An-Naml 23-44: Kajian Qashash Al-Qur'an.*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran kisah Ratu Balqis dalam kitab *tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'arifati al-Qur'an* dan *tafsir Ayat Suci Lenyepaneun* QS.an-Naml 23-44 melalui pendekatan Qashash al-Qur'an?
2. Bagaimana hak dan nilai-nilai politik perempuan dalam kitab *tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'arifati al-Qur'an* dan *tafsir Ayat Suci Lenyepaneun* studi kisah Ratu Balqis QS.an-Naml 23-44?

3. Bagaimana hak dan nilai-nilai politik perempuan studi kisah Ratu Balqis QS.an-Naml 23-44 dalam tradisi masyarakat Sunda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran kisah Ratu Balqis dalam kitab *tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'arifati al-Qur'an* dan *tafsir Ayat Suci Lenyepaneun* QS.an-Naml 23-44 menurut pendekatan Qashash al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui hak dan nilai-nilai politik perempuan dalam kitab *tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'arifati al-Qur'an* dan *tafsir Ayat Suci Lenyepaneun* studi kisah Ratu Balqis QS.an-Naml 23-44.
3. Untuk mengetahui hak dan nilai-nilai politik perempuan studi kisah Ratu Balqis QS.an-Naml 23-44 dalam tradisi masyarakat Sunda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, khususnya kajian Qashash al-Qur'an, dengan menampilkan perspektif baru tentang hak dan nilai-nilai politik perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pemahaman hak dan nilai-nilai politik perempuan dalam tradisi masyarakat Sunda, serta menegaskan bahwa nilai tersebut bersifat terbuka dan tidak membedakan berdasarkan gender.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema kepemimpinan perempuan, hak politik perempuan, serta pendekatan Qashash al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan ajar dalam mata kuliah tafsir, studi gender dalam Islam, dan pemikiran politik Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam memahami bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas yang setara dalam proses pengambilan keputusan publik. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi untuk mendorong partisipasi

perempuan dalam ruang publik, khususnya dalam bidang politik, dengan landasan teologis yang kuat dan kontekstual.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah tahap penting yang harus dilakukan penulis sebelum melaksanakan penelitian. Melalui langkah ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas, menambah wawasan, serta memperkuat landasan teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Setelah berupaya mencari dan menelusuri penelitian yang serupa, penulis menemukan beberapa penelitian yang sama membahas tentang kisah Ratu Balqis dan Qashash Al-Qur'an yaitu:

Artikel jurnal berjudul "*Karakteristik Kepemimpinan Ratu Balqis dalam Al-Qur'an*" karya Sakdiah (2023). Artikel jurnal ini membahas tentang kisah Ratu Balqis dalam Surah an-Naml ayat 23-40 merepresentasikan model kepemimpinan perempuan yang ideal dalam perspektif Al-Qur'an, ditandai oleh karakter demokratis, bijaksana, cerdas, cinta damai, teliti, komunikatif, serta mampu memanfaatkan media sebagai sarana informasi dan diplomasi. Melalui pendekatan analisis teks terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai kitab tafsir, penelitian ini menunjukkan bahwa Ratu Balqis bukanlah pemimpin otoriter, melainkan pemimpin yang mengedepankan musyawarah, pertimbangan rasional, dan kepentingan rakyat. Al-Qur'an digambarkan memberikan apresiasi positif terhadap kepemimpinan perempuan dengan menampilkan Balqis sebagai sosok yang matang secara emosional, intelektual, dan spiritual, serta mampu menjaga stabilitas negaranya tanpa mengandalkan kekerasan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam bukanlah sesuatu yang terlarang, melainkan memiliki legitimasi teologis dan moral, sekaligus menunjukkan adanya prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitas kepemimpinan publik. Artikel jurnal ini fokus pada aspek kepribadian dan gaya kepemimpinan Ratu Balqis sedangkan penelitian ini mengkaji kisah Ratu Balqis melalui pendekatan hak politik bagi Perempuan dengan menggunakan pendekatan Qashash al-Qur'an.

Artikel jurnal yang berjudul “*Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*” karya Siti Robikah (2021). Artikel jurnal ini membahas bahwa kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an tidak hanya berfungsi sebagai narasi historis, melainkan mengandung tujuan-tujuan normatif (maqāsid) yang relevan dengan kehidupan sosial dan politik. Melalui pendekatan tafsir maqashidi yang meliputi analisis kebahasaan, konteks ayat, serta perumusan kemaslahatan, penelitian ini menegaskan bahwa figur Ratu Balqis merepresentasikan kemampuan perempuan dalam memimpin ruang publik secara rasional, bijaksana, dan strategis. Kisah ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan figur Nabi Sulaiman sebagai simbol bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama dalam kepemimpinan apabila didasarkan pada kapasitas, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, Al-Qur’an melalui kisah Ratu Balqis secara implisit mengakui legitimasi kepemimpinan perempuan serta menegaskan prinsip kesetaraan dalam peran publik, selama berorientasi pada kemaslahatan umat. Artikel jurnal ini berfokus dengan pendekatan maqasid al-syari’ah sedangkan penelitian ini berfokus pada hak politik Perempuan.

Artikel jurnal berjudul “*Menguak Nilai-Nilai Kedamaian dalam Musyawarah (Telaah terhadap Kisah Politik Ratu Balqis dalam Tafsir al-Munir Wahbah al-Zuhaili)*” karya Ahmad Fadhil Rizki dkk (2020). Artikel jurnal ini membahas bahwa kisah politik Ratu Balqis dalam QS. an-Naml menggambarkan model kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai perdamaian, rasionalitas, dan musyawarah sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Melalui pendekatan studi kepustakaan terhadap Tafsir al-Munir, penelitian ini menunjukkan bahwa Ratu Balqis tidak bertindak tergesa-gesa, melainkan mempertimbangkan risiko konflik, mendiskusikan persoalan negara bersama para pembesarnya, serta memilih jalur diplomasi demi menghindari kehancuran rakyatnya. Musyawarah dipahami sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama, menjaga stabilitas sosial, dan menciptakan kemaslahatan umum. Dengan demikian, kisah Ratu Balqis tidak hanya berfungsi sebagai narasi historis, tetapi juga mengandung pesan normatif tentang pentingnya partisipasi,

kebijaksanaan, dan orientasi pada perdamaian dalam praktik kepemimpinan politik. Artikel jurnal ini berfokus pada nilai-nilai perdamaian dan musyawarah dalam kepemimpinan politik Ratu Balqis dengan merujuk pada Tafsir al-Munir sedangkan penelitian ini berfokus pada hak politik perempuan dengan menggunakan kitab tafsir tafsir yang berbeda.

Skripsi yang berjudul “*Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis dalam Surah An-Naml (Kajian Semiotika)*” karya Nur Azny Agustina Putri (2021). Skripsi ini membahas bahwa kajian semiotika Roland Barthes terhadap Surah An-Naml ayat 15-44 berhasil mengungkap lapisan makna denotatif, konotatif, dan mitologis dari kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Melalui pembacaan heuristik dan retroaktif, penelitian ini menunjukkan bahwa kisah tersebut tidak hanya menyajikan narasi historis, tetapi juga memuat pesan-pesan teologis, etis, dan sosial yang mendalam, seperti pengakuan atas kekuasaan Allah, adab orang berilmu, sikap rendah hati, metode dakwah yang bijaksana, prinsip tabayyun, serta karakter kepemimpinan ideal yang demokratis, tegas, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis dalam Al-Qur’an memiliki relevansi kontekstual yang kuat dan dapat dijadikan rujukan penting dalam kajian tafsir tematik, khususnya terkait kepemimpinan, etika kekuasaan, dan nilai-nilai moral dalam Islam. Skripsi ini berfokus pada pendekatan semiotika Roland Barthes sedangkan penelitian ini berfokus pada hak politik Perempuan.

Tesis yang berjudul “*Sosialita Perspektif Tafsir Modern (Studi Terhadap Kisah Ratu Balqis)*” karya Sella Raudhatul Qolbi (2023). Tesis ini membahas bahwa kisah Ratu Balqis dalam QS. An-Naml ayat 23-44 merepresentasikan konsep sosialita Islami yang berbeda dari pemahaman sosialita modern yang identik dengan gaya hidup glamor. Melalui pendekatan tafsir klasik dan modern dengan analisis deskriptif serta linguistik, penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur’an menampilkan Ratu Balqis sebagai figur perempuan berstatus sosial tinggi yang memiliki karakter kepemimpinan ideal, seperti demokratis,

bijaksana, cerdas, diplomatis, dan cinta damai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialita dalam perspektif Al-Qur'an merujuk pada kemandirian politik, kemandirian ekonomi, serta kemandirian dalam menentukan pilihan berdasarkan rasionalitas dan nilai ketauhidan. Dengan demikian, kisah Ratu Balqis menjadi tipe perempuan ideal dalam Islam yang aktif di ruang publik, berintegritas, dan mampu menjalankan kepemimpinan secara efektif tanpa menanggalkan nilai-nilai keimanan dan moralitas, sehingga relevan dijadikan rujukan dalam kajian tafsir tematik tentang perempuan, kepemimpinan, dan sosialitas dalam Al-Qur'an. Tesis ini berfokus pada konsep sosialita Islami dan karakteristik kepemimpinan perempuan sedangkan penelitian ini berfokus pada hak politik Perempuan.

Artikel jurnal yang berjudul *"Hak Politik Wanita dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an"* yang ditulis oleh Az Zahra Salsabila dkk (2022). Artikel jurnal ini membahas bahwa hak politik perempuan dalam Islam perlu dipahami secara komprehensif dan kontekstual melalui pendekatan tafsir. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. al-Ahzab [33]: 33, QS. an-Naml [27]: 23, dan QS. al-Qashash [28]: 23 seringkali melahirkan anggapan larangan perempuan berkiprah di ranah politik. Namun, melalui analisis Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb, penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an pada hakikatnya memberikan peluang dan hak yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, selama tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Kisah Ratu Balqis dipahami tidak sebagai dalil pelarangan kepemimpinan perempuan, melainkan sebagai gambaran historis yang menunjukkan kapasitas perempuan dalam memimpin dan mengambil keputusan politik secara rasional dan diplomatis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an dan tafsirnya, serta relevan dijadikan rujukan dalam kajian hak politik perempuan dalam perspektif Islam kontemporer. Artikel jurnal ini berfokus pada pendekatan tafsir tematik berbasis Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Quthb sedangkan penelitian ini berfokus

pada hak politik perempuan dengan kajian Qashash al-Qur'an secara spesifik memusatkan kajian pada narasi kisah Ratu Balqis dalam QS.an-Naml ayat 23-44.

Artikel jurnal yang berjudul "*Penafsiran Peran Politik Perempuan: Kritik Fatima Mernissi Perspektif Feminis*" karya Ghufron Maksum dkk (2025), Artikel jurnal ini menegaskan adanya bias patriarkal dalam tafsir al-Qur'an klasik yang selama ini membatasi peran politik perempuan, khususnya dalam isu kepemimpinan. Melalui metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis teks kritis dan perspektif feminis, para penulis menunjukkan bahwa kritik Fatima Mernissi berhasil mendekonstruksi tafsir-tafsir tradisional yang tidak kontekstual serta membuka ruang pemahaman baru yang lebih egaliter terhadap ayat-ayat politik dalam al-Qur'an. Hasil kajian ini menegaskan bahwa al-Qur'an pada dasarnya mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan gender, sehingga perempuan memiliki legitimasi teologis untuk berpartisipasi aktif dalam ranah politik dan kepemimpinan publik, menjadikan pendekatan tafsir feminis relevan dan penting dalam konteks Islam kontemporer. Artikel jurnal ini berfokus pada kritik tafsir klasik melalui Perspektif feminisme islam Fatima Mernissi sedangkan penelitian ini kajian Qashash al-Qur'an yang berfokus pada kisah Ratu Balqis tentang hak politik Perempuan.

Artikel jurnal yang berjudul "*Qashash Al-Qur'an: Fakta atau Sebatas Rekaan?*" yang ditulis oleh Zelviyah Nur Hajma dkk (2025), Artikel jurnal ini membahas bahwa Qashash al-Qur'an merupakan kisah-kisah wahyu yang memiliki nilai historis, edukatif, dan teologis yang kuat, serta tidak dapat dipahami sebagai rekaan atau fiksi semata. Melalui kajian kualitatif berbasis literatur dalam perspektif *ulumul Qur'an*, penelitian ini menegaskan bahwa kisah-kisah dalam al-Qur'an disajikan secara anonim, dan berulang bukan untuk kepentingan kronologi sejarah, melainkan untuk menekankan pesan moral, penguatan iman, serta pembentukan karakter umat. Pengulangan kisah juga menunjukkan keindahan balaghah dan kemukjizatan al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang relevan lintas zaman. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat

pandangan bahwa qashash al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman etika dan spiritual bagi manusia, sekaligus menjadi landasan penting dalam pengembangan kajian tematik al-Qur'an, khususnya dalam memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kisah-kisahannya. Artikel jurnal ini berfokus pada kajian Qashash al-Quran bersifat umum sedangkan penelitian ini bersifat spesifik pada kajian kisah Ratu Balqis.

Artikel jurnal yang berjudul "*Dinamika Peran Perempuan Sunda dalam Kepemimpinan Politik Era Modern*" yang ditulis oleh Amanah dkk. (2023), menjelaskan bahwa perempuan dalam kebudayaan Sunda pada dasarnya memiliki kedudukan yang terhormat dan setara dengan laki-laki, sebagaimana tercermin dalam mitologi serta filosofi Sunda. Namun, masuknya budaya patriarki pada masa feodalisme menyebabkan posisi perempuan menjadi subordinat dan lebih dibatasi pada ranah domestik. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa pada era modern telah terjadi perubahan pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan Sunda, di mana perempuan mulai diterima sebagai sosok yang mampu memimpin, khususnya di bidang politik. Perempuan Sunda yang terlibat dalam politik dinilai membawa nilai-nilai seperti keterbukaan, musyawarah, kepedulian sosial, dan kemampuan komunikasi yang baik. Meski demikian, masih terdapat hambatan berupa rendahnya rasa percaya diri serta pengaruh budaya patriarki yang masih bertahan. Penelitian ini relevan dengan kajian kepemimpinan perempuan Sunda karena memperlihatkan adanya kesinambungan nilai kesetaraan perempuan dalam budaya Sunda hingga masa kini.

Artikel jurnal yang berjudul "*Perempuan dan Kearifan Lokal: Performativitas Perempuan dalam Ritual Adat Sunda*" yang ditulis oleh Jajang A. Rohmana dan Ernawati (2014), perempuan dalam komunitas adat Kampung Banceuy, Subang, menempati posisi penting dalam ritual Mapag Dewi Sri sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan sumber kehidupan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya terlibat dalam persiapan ritual, seperti memasak, menyiapkan perlengkapan, serta menghias

lokasi upacara, tetapi juga berperan dominan dalam prosesi inti seperti tari gembyung, helaran, dan nutu (menumbuk padi). Melalui perspektif performativitas Judith Butler, penulis menjelaskan bahwa identitas perempuan dibentuk melalui pengulangan tindakan, atribut, dan penampilan feminin dalam ritual tersebut. Busana berwarna-warni, riasan wajah, serta gerakan tari menjadi simbol konstruksi sosial tentang femininitas yang diakui masyarakat adat. Dengan demikian, ritual Mapag Dewi Sri merepresentasikan bentuk kearifan lokal Sunda yang tidak menindas perempuan, melainkan memberi ruang penghormatan, peran sosial, dan identitas budaya yang kuat bagi perempuan.

F. Kerangka Berpikir

Dalam kajian ulumul Qur'an, Qashash al-Qur'an dipahami sebagai narasi-narasi yang disampaikan Al-Qur'an tentang peristiwa umat terdahulu, para nabi, dan tokoh-tokoh tertentu, bukan semata sebagai kisah historis, melainkan sebagai penyampaian petunjuk (hidayah), pelajaran ('*ibrah*'), serta pembentukan kesadaran moral dan sosial. Menurut Manna' al-Qatthan dalam *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* Qashash al-Qur'an merupakan bentuk penyampaian Al-Qur'an mengenai kisah-kisah umat terdahulu, para nabi sebelumnya, serta berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Al-Qur'an memuat banyak penjelasan tentang kejadian historis, perjalanan bangsa-bangsa, kondisi negeri-negeri, serta jejak peradaban yang mereka tinggalkan. Seluruh peristiwa tersebut disajikan dengan gaya penceritaan yang khas, komunikatif, dan sarat daya tarik, sehingga mampu menyentuh emosi pembaca sekaligus menyampaikan pesan moral yang mendalam (Qatthan, 1995).

Dalam penelitian ini, istilah "hak politik" tidak dimaksudkan seperti dalam sistem demokrasi modern, misalnya hak memilih atau dipilih dalam pemilu. Sebaliknya, istilah ini dipahami dalam arti yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu hak untuk berpendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, memimpin, dan berperan aktif dalam urusan masyarakat (Yasin, 2022). Hak politik dimaknai sebagai hak partisipasi dalam urusan publik, hak menyampaikan pendapat, hak terlibat dalam proses pengambilan keputusan,

serta hak memegang otoritas sosial ketika memiliki kapasitas dan legitimasi. Pemaknaan ini berangkat dari prinsip-prinsip Qur'ani tentang keadilan (*'adl*), amanah, musyawarah (*syura*), dan kebebasan (Zawawi Abdullah, 2015).

Ibnu Taimiyyah dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyah* menegaskan bahwa mengatur dan mengurus kepentingan manusia merupakan salah satu kewajiban terbesar dalam agama, karena keberlangsungan agama dan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengelolaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia tidak akan terwujud secara sempurna tanpa adanya kehidupan berkelompok dan kehidupan berkelompok tidak dapat berjalan tanpa kepemimpinan (Hajar, 2021). Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi yang memerintahkan agar dalam perjalanan tiga orang sekalipun harus menunjuk seorang pemimpin. Menurutnya, kewajiban mengangkat pemimpin berlaku tidak hanya dalam skala besar, tetapi juga dalam kelompok kecil, demi terlaksananya amar ma'ruf nahi munkar, jihad, penegakan keadilan, pelaksanaan ibadah seperti haji dan shalat Ied, pengelolaan zakat, pembelaan terhadap orang yang dizalimi, serta penerapan hukum-hukum Islam (Zawawi Abdullah, 2015).

Dalam mitologi Sunda, perempuan dipandang memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi pemimpin karena masyarakat Sunda mengenal nilai-nilai luhur yang tidak membatasi kepemimpinan hanya kepada laki-laki semata. Perempuan Sunda diposisikan sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk berperan dalam kehidupan sosial, pendidikan, bahkan kepemimpinan apabila memiliki kualitas diri yang baik (Amanah et al., 2023). Dalam menjalankan kepemimpinannya, perempuan Sunda menjadikan falsafah hidup masyarakat Sunda sebagai landasan untuk mengembangkan kualitas diri. Secara sosiologis dan antropologis, masyarakat Sunda mengenal prinsip-prinsip kepemimpinan yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu *cageur* (sehat lahir batin), *bageur* (berbudi baik), *bener* (jujur dan benar), *pinter* (cerdas), serta *tur singer* (sigap dan terampil) (Surya, 2010).

Qashash al-Qur'an sebagai kisah-kisah yang termuat dalam al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai narasi sejarah, tetapi juga mengandung nilai moral,

sosial, dan politik yang relevan untuk kehidupan manusia. Salah satu kisah yang penting dalam pembahasan hak politik perempuan adalah kisah Ratu Balqis dalam QS. an-Naml ayat 23-44, yang menggambarkan sosok perempuan sebagai pemimpin yang bijaksana, cerdas, mampu bermusyawarah, serta mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Kisah ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memberikan ruang terhadap kepemimpinan perempuan selama dijalankan dengan prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep kepemimpinan perempuan Sunda yang berlandaskan falsafah hidup masyarakat Sunda, yaitu *cageur, bageur, bener, pinter, tur singer*. Dalam budaya Sunda, perempuan dipandang memiliki potensi memimpin apabila mampu menjaga integritas moral, kecerdasan, serta kepedulian sosial. Maka dari itu, Qashash al-Qur'an melalui kisah Ratu Balqis dapat menjadi landasan normatif untuk memahami hak politik perempuan sekaligus relevan dengan nilai-nilai lokal Sunda dalam membangun model kepemimpinan perempuan yang berkarakter, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Kemudian, pemilihan *tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'rifati al-Qur'an* karya K.H. Ahmad Sanusi dan *tafsir Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim didasarkan pada posisi keduanya sebagai karya tafsir Sunda yang memiliki latar belakang sosial serta corak penafsiran yang berbeda. *Raudhatul 'Irfan fi Ma'rifati al-Qur'an* mencerminkan tradisi pesantren yang menitikberatkan pada aspek keagamaan dan fikih, sedangkan *Ayat Suci Lenyepaneun* merefleksikan corak tafsir Sunda yang lebih modern dengan pendekatan *adab ijtima'i* yang berorientasi pada persoalan sosial kemasyarakatan. Perbedaan perspektif dan karakteristik kedua tafsir tersebut memungkinkan kajian yang lebih komprehensif mengenai pemaknaan hak dan nilai-nilai politik perempuan dalam kerangka budaya Sunda.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperoleh Gambaran apa yang akan dibahas dalam skripsi ini maka penulis paparkan secara sistematis pembahasan penelitian sebagai berikut

BAB I: Merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan kajian teoritis yang membahas tentang pengertian hak politik perempuan dalam Islam, hak politik perempuan dalam al-Qur'an, pandangan ulama tentang kepemimpinan perempuan, kajian Qashash al-Qur'an, pengertian dan karakteristik tafsir Sunda dan relevansi dengan kepemimpinan perempuan Sunda.

BAB III: Metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV: Hasil penelitian yang berupa jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, yaitu analisis kisah Ratu Balqis QS.an-Naml 23-44 terkait hak dan nilai-nilai politik perempuan dalam *tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'rifati al-Qur'an* karya K.H. Ahmad Sanusi dan *tafsir Ayat Suci Lenyepaneun* karya Moh. E. Hasim kemudian dikaitkan dengan tradisi masyarakat Sunda.

BAB V: Penutup yang berisi simpulan dan saran dalam bab ini penulis menyampaikan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan saran untuk disampaikan mengenai penelitian yang telah dilakukan.